

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan, bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar dipelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20% Kuncoro (2007:2). Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apabila pemerintah terlalu menekankan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud “pencapaian target” Widjaja(2005).

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat provinsi (Pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan, retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu jasa umum dan jasa usaha.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, faktor kemampuan daerah merupakan hal yang penting, khususnya dalam era otonomi daerah. Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan

dari pemerintahan daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Disini akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD (Susetyo, 2008: 39-53).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Jati (2008) tentang “Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur”. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tingkat II di Propinsi Jawa Timur”. Dan skripsi yang diteliti oleh Dewi (2011) tentang “kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapata asli daerah dan belanja daerah (APBD) selama periode 2005-2009 (studi kasus Pemerintahan Kota Wonogiri)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi yaitu data dan populasi penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di eksKaresidenan Banyumas dan periode yang digunakan tahun 2006 sampai 2010. Alat analisis yang digunakan antara lain analisis *time series*, analisis *cross-section* dan analisis ANOVA.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul “Peranan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di eksKaresidenan Banyumas”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Berapa persen kontribusi pajak dan retribusi pajak terhadap PAD pada Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas?
3. Berapa besar efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah?
4. Apakah terdapat perbedaan laju pertumbuhan, kontribusi, dan efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk menganalisis besar laju pertumbuhan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di eksKaresidenan Banyumas
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak dan retribusi pajak terhadap PAD pada Kota/Kabupaten di eksKaresidenan Banyumas
3. Untuk menganalisis besar efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

4. Untuk menganalisis perbedaan laju pertumbuhan, kontribusi, dan efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten eksKaresidenan Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan menggali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan diolah di beberapa sektor yang ada demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat lebih memahami seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di eksKaresidenan Banyumas.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

5. Sistematika Penyusunan Skripsi

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan daerah, pengertian pajak daerah, pengertian retribusi daerah, penelitian terdahulu, kerangka teori, perumusan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV Analisis Data, menyajikan data-data dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V Penutup, menyajikan kesimpulan dan keterbatasan penelitian.